

Pribumi Primary Education at Colonial Era (1900-1920)

Cyntia Ayu Lestari¹, Sumardi², Nurul Umamah³, Marjono⁴, Riza Afita Surya⁵

¹²³⁴⁵ Pendidikan Sejarah, Universitas Jember

Email: Cyntiaayulestari0@gmail.com

Abstract

This research discusses specific primary education for pribumi children during the Dutch colonial period 1900-1920. To find out the forming and condition of indigenous primary schools that were established and operating, the researchers conducted this research with the following objectives: (1) to analyze the establishment of indigenous primary education during the Dutch colonial period 1900-1920 and (2) to analyze the implementation of indigenous primary education during the Dutch colonial administration in 1900-1920. The research method used consists of 5 steps namely: topic selection, heuristics, verification, interpretation, historiography. The results show that the establishment of indigenous primary education in Indonesia during the Dutch colonial period was based on political-economic interests carried out by the government. The Dutch colonial government needed employees who could help on the plantations as clerks. Meanwhile, the problem of illiteracy among the indigenous people is still very high. Because of this, schools were opened for the Bumiputera community to educate prospective government employees who could read and write. The limitations of these goals resulted in minimal development in this Bumiputera school curriculum.

Keywords: primary education, pribumi, colonial dutch period.

PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan dasar era kolonial di Indonesia memiliki pola yang unik dan rumit. Awalnya pendidikan dasar yang didapatkan masyarakat Indonesia hanya mencakup pembelajaran sederhana. Pendidikan dasar yang didapatkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Alpian dkk, 2019). Pendidikan yang diajarkan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian di awal abad ke-16, bangsa Eropa melakukan pelayaran untuk menjelajah samudra dan mencari rempah-rempah di wilayah Indonesia. Keputusan untuk menetap dan berdagang, rupanya memberikan perubahan yang sangat besar di sektor perekonomian, budaya, hingga pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang mengalami perubahan mulai mendapatkan pengaruh. Mulanya bangsa Portugis mengatur dan menfokuskan pendidikan dengan tujuan menyebarkan agama Katolik. Penyebaran dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah sekolah misionaris, dengan harapan terlahir kaum agamis baru dan memenuhi misi gereja (Syaharuddin & Susanto, 2019). Kemudian tiba orang-orang Belanda dan menggantikan kekuasaan Portugis dengan kepentingan berdagangnya. Perubahan pemegang kekuasaan mendorong masyarakat Indonesia menuntut agar orang-orang Belanda melanjutkan pendidikan yang telah didirikan Portugis. Namun, Pemerintahan Kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan diskriminatif dan membatasi perkembangan pendidikan lokal (Rifa'i, 2017).

Keadaan pendidikan tersebut sengaja diciptakan Pemerintahan Kolonial Belanda dengan tujuan mencetak warga Bumiputra yang patuh pada urusan penjajahan. Pemerintahan Kolonial Belanda beranggapan melalui pendidikan, tenaga kerja dapat diciptakan untuk membantu kedudukan penjajah dan mematuhi kepentingannya. Akibatnya pendidikan yang berjalan hanya sebatas pengetahuan dan kecakapan karena minimnya tujuan. Kemudian lahirlah politik etis sebagai penyelamat keadaan pendidikan di Hindia-Belanda. Politik etis dengan misi mulianya berhasil mengubah tatanan pendidikan di Hindia-Belanda menjadi lebih baik. Sayangnya penyelenggaraan pendidikan harus berjalan dengan penyesuaian politik ekonomi yang dijalankan pemerintahan kolonial Belanda.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pendidikan dasar khusus pribumi dengan judul “pendidikan dasar pribumi masa kolonial Belanda tahun 1900-1920”. Yang kemudian melahirkan pertanyaan seperti: bagaimana Pendirian pendidikan dasar pribumi masa kolonial Belanda tahun 1900-1920?, bagaimana pelaksanaan pendidikan dasar pribumi masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1900-1920?. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan lebih dalam mengenai pendidikan dasar pribumi yang meliputi: kurikulum, guru, inspeksi, fasilitas sekolah dll. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam penulisan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data sesuai dengan topik yang akan diteliti. Metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo (2018) memiliki lima langkah berikut: (i) pemilihan topik, (ii) heuristik (pengumpulan sumber), (iii) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (iv) interpretasi (analisis dan sintesis), (v) historiografi (penulisan sejarah).

Tahap pertama penelitian ini adalah pemilihan topik, Kuntowijoyo menjelaskan, bahwa pemilihan topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual sang penulis (Kuntowijoyo, 2018). Alasan penulis memilih topik ini karena rasa ingin tahu mengenai sejarah pendidikan dasar di Indonesia. Selain alasan tersebut ketersediaan sumber yang dimiliki sangat membantu penulis menyelesaikan penulisan ini. *Tahap kedua* adalah heuristik yakni pengumpulan sumber, peneliti telah mencari sumber primer dan sekunder dan sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian ini. Seperti buku karya Stroomberg yang diterjemahkan dengan judul HINDIA BELANDA 1930 dan sumber pendukung lainnya. *Tahap ketiga* adalah verifikasi yakni kritik sejarah, yang terdiri dari kritik ekstern dan intern. Kritik ini sangat perlu untuk mengetahui sumber yang kita gunakan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. *Tahap keempat* interpretasi yakni analisis dan sintesis, merupakan suatu penafsiran yang digunakan sebagai inti subjektivitas. *Tahap kelima* merupakan penulisan sejarah seperti dibawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Dasar pribumi masa Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1900-1920

Pendirian pendidikan dasar dilatar belakangi oleh motif politik ekonomi yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda dalam kedudukannya di Indonesia. Awal mulanya pendidikan hanya diperuntukkan untuk anak-anak pegawai Belanda yang ikut pindah ke Indonesia. Kemudian krisis yang disebabkan tanam paksa mengakibatkan merosotnya kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa. Keadaan tersebut menarik kaum sosialis untuk membuat perubahan di Pulau Jawa. Van Deventer menyuarakan pendapatnya dalam artikelnya yang berjudul “Hutang Kehormatan”, berisi pemerintahan kolonial Belanda telah mendapatkan banyak keuntungan dari hasil panen tanam paksa. Keuntungan tersebut harus dikembalikan meski kembali dalam bentuk lain.

Pendapat tersebut diterima oleh ratu Belanda Wilhelmina kemudian mendukung upaya memperbaiki keadaan ekonomi rakyat Indonesia dengan membentuk badan penyelidik (Daliman, 2017). Politik etis mulai dijalankan dengan 3 misi perbaikan yakni: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Sayangnya penerapan politik etis rupanya hanya dijalankan oleh segelintir orang saja. Kepentingan politik ekonomi lebih segalanya dibandingkan usaha perbaikan tanah Jawa. Karenanya pendidikan yang dijalankan tidak lepas dari kebijakan politik yang menguntungkan pemerintah kolonial Belanda (Rifa'i, 2017).

Ciri politik pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda: (1) gradualisme, merupakan pendidikan yang berjalan sangat lambat, (2) dualisme, (sistem pendidikan yang buruk untuk anak-anak pribumi dan sitem yang sempurna untuk anak-anak Belanda), (3) kontrol sentral, seluruh keputusan berada ditangan pemerintah kolonial Belanda, (4) keterbatasan tujuan, yang hanya mencetak pegawai pemerintah saja, (5) prinsip konkordansi, pemberian sistem pendidikan yang menyamai sistem yang ada di negeri Belanda sehingga mempersulit anak pribumi dan timur asing yang bersekolah, (6) tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, pendidikan yang diberikan tidak

mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (Nasution, 1995).

Ciri politik pendidikan diatas telah melahirkan pendidikan dasar yang diskriminatif bagi anak-anak pribumi. Tidak lain memang tujuannya mempersulit keadaan anak pribumi agar selalu keterbelakang dibandingkan anak-anak Belanda. Karena jika dilakukan sebaliknya hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan kedudukan pemerintahan Belanda di Indonesia. Tujuan mereka hanya sebatas mencetak pegawai yang memiliki pengetahuan dasar untuk melakukan pekerjaannya saja. Karenanya sekolah dibagi menjadi 2 jenis menurut bahasa pengantarnya yakni pendidikan pribumi dan pendidikan non-pribumi (Barat) (Stroomberg, 2018).

Pelaksanaan Pendidikan Dasar Pribumi masa Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1900-1920

Pendidikan dasar di Indonesia masa kolonial Belanda dalam penerapannya hanya condong pada satu sisi. Pendidikan untuk anak-anak Belanda diperlakukan cukup layak dibandingkan pendidikan untuk anak pribumi. Pendidikan menggunakan bahasa pengantar Belanda dapat dikatakan pendidikan negeri karena di kelola langsung oleh pemerintah Belanda. Sedangkan pendidikan pribumi dapat dikatakan pendidikan swasta karena dikelola sendiri oleh masyarakat desa. Jelas sekali perbedaannya jika orang Belanda dan orang Pribumi mendapatkan perilaku yang berbeda (Wiessing, 1901).

Pembahasan terbagi menjadi 2 berdasarkan bahasa pengantar pendidikannya yakni pendidikan pribumi dan pendidikan non-pribumi (Barat). Fokus penelitian ini adalah sekolah dengan bahasa pengantar bahasa daerah yakni pendidikan dasar pribumi. Pendidikan dasar pribumi didirikan untuk mempermudah anak-anak ras asli Indonesia untuk memahami pembelajaran. Sayangnya pasilitas dan sistem pendidikannya berjalan sederhana karena dikelola oleh masyarakat lokal pemerintah kolonial Belanda kurang tertarik mengsponsorinya. Sekolah-sekolah pribumi ini terdiri dari berbagai macam yang terdiri dari:

1. Sekolah Dasar Kelas Satu (*De School der Eerste Klasse*)

Sekolah Kelas Satu mulai dilaksanakan di tahun 1894 dengan hasil rombakan dari sekolah rendah. Sekolah Kelas Satu merupakan sekolah yang terbaik yang tersedia untuk anak-anak Indonesia. Sayangnya sekolah ini hanya terdapat di kota-kota penting di pulau Jawa, seperti kota pusat perdagangan, kawasan pemerintahan, dan lingkungan ramai lalu lintas. Tahun 1908 berdiri Sekolah Kelas Satu pertama di luar pulau Jawa sementara saat itu telah tersedia 60 sekolah kelas Satu di pulau Jawa. Kemudian jumlah sekolah bertambah menjadi 12 di tahun 1914 dan saat itu pulau Jawa memiliki 83 sekolah yang serupa. Keadaan tersebut mengakibatkan rasa tidak puas di kalangan penduduk luar Jawa yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan barat (Nasution, 1995).

Sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda dianggap sekolah yang baik dan didambakan semua orang. Surat dari Tapanuli dan Kalimantan menyatakan keinginannya dalam bersekolah karena khawatir tertinggal dari anak-anak Jawa dan anak Cina. Colijn memandang bahaya Sekolah Kelas Satu yang meluas dengan cepat. Sekolah berkualitas dan mahal ini akan melahirkan proletariat intelektual yang frustrasi jika tidak mendapatkan pekerjaan dalam masyarakat. Menurutnya sebagai penasihat pemerintah, 3 hingga 5 Sekolah Kelas Satu saja sudah dapat untuk pendidikan pulau Sumatera. Dengan adanya sekolah tersebut tidak diperlukan lagi sekolah untuk anak-anak raja.

Kurikulum sekolah disesuaikan dengan peraturan tahun 1893. Yakni mata pelajaran hanya memuat menulis dan membaca yang dipelajari menggunakan bahasa daerah dengan huruf daerah dan latin, menulis dan membaca menggunakan bahasa Melayu, berhitung, menggambar, ilmu alam, ilmu bumi Indonesia, sejarah pulau tempat tinggal, mengukur tanah. Program sekolah lebih terperinci terdapat pelajaran agama dan industri. Karena sekolah ini berbahasa daerah diberikan 7 macam program yaitu: bahasa Melayu Riau, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Mandailing, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis. Kelas 1 dan 2 mendapatkan 18 jam pelajaran dalam seminggu, kelas 3 sampai 5 mendapatkan jam pelajaran 27 jam.

Sekolah dibagi dalam 5 kelas sekolah dengan satu ruangan tidak digunakan lagi. Sayangnya sekolah ini tidak populer di kalangan priyayi. Karena dalam kurikulumnya tidak memberikan pelajaran bahasa Belanda dan tidak membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. ELS masih menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Maka tidak dipungkiri banyak orang tua anak Indonesia yang memasukkan anaknya ke ELS. Akibat efek politik etis peraturan masuk ELS diperlunak. Sehingga terjadi lonjakan permintaan anak Indonesia yang masuk ELS. Karena lonjakan tersebut maka bahasa Belanda dimasukkan dalam program sekolah kelas 1 dan lama belajar diperpanjang menjadi 6 tahun di tahun 1907.

Perubahan yang berjalan sesuai waktu mengakibatkan langkanya guru Belanda. Guru-guru Belanda tidak tertarik bekerja untuk mengajar anak-anak Indonesia meski telah diberi gaji tambahan. Gedung sekolah dan fasilitas yang kurang memadai jika dibandingkan dengan ELS sangat jauh. Dan guru-guru ini tidak ingin bekerja di bawah pemimpin kepala sekolah yang berbangsa Indonesia. Meski bahasa Belanda telah dijadikan mata pelajaran namun sekolah ini tidak populer seperti yang diharapkan. Sekolah ini menjadi sekolah terminal tanpa kesempatan melanjutkan pelajaran. Bahkan sekolah ini tidak dapat memberikan pelatihan yang cukup untuk menempuh ujian pegawai rendah.

Buku sekolah kelas 2 masih digunakan. Penambahan mata pelajaran Belanda jelas membutuhkan buku-buku baru. Metode mengikuti negeri Belanda. Belajar membaca dilakukan mengikuti metode huruf yang mengkombinasikan huruf-huruf membentuk suku kata, kata, dan kemudian kalimat. Buku populer masa itu adalah buku berbahasa Melayu yang berjudul rempah-rempah kalangan Grivel. Untuk pelajaran menghitung menggunakan buku hitungan karangan Wisselink, satu cirit untuk setiap kelas menggunakan titik-titik segitiga segi empat untuk memberi pengertian bilangan (Nasution, 1995).

2. Sekolah Dasar Kelas Dua (*De School der Tweede Klasse*)

Sekolah Kelas Dua didirikan dengan tujuan mengelompokkan masyarakat golongan rendah atau sekolah rakyat. Pendidikan yang diajarkan merupakan pendidikan sederhana yang dapat ditempuh untuk seluruh rakyat pribumi.

Sayangnya Sekolah Kelas Dua tidak memiliki popularitas dikalangan masyarakat pribumi. Sekolah ini tidak berkembang menjadi sekolah umum untuk seluruh masyarakat, bahkan masyarakat mempertanyakan kesesuaian pendidikan yang diajarkan. Kemudian pendapat tersebut berubah karena perkembangan sekolah yang tidak terduga. Sekolah yang ditetapkan dengan lama belajar 3 tahun ini memiliki kemungkinan untuk diperluas programnya berdasarkan rekomendasi komisi sekolah dan persetujuan inspektur. Karenanya perluasan program tersebutlah menjadikan sekolah kelas dua ini hampir tidak memiliki perbedaan dengan sekolah kelas satu. Pemerintah tidak perlu memikul finansial dan sosial politik sejenis karena sekolah bersifat umum untuk seluruh rakyat. Pemerintah menginginkan pengeluaran yang sedikit.

Sekolah kelas dua adalah sekolah dengan peminat yang rendah dikalangan penduduk Indonesia. 4% anak-anak mendapatkan tempat di sekolah. Sayangnya hampir setiap tahun banyak murid yang ditolak sekolah dengan alasan tidak adanya tempat duduk lagi. Dengan alasan finansial dan politik sosial pemerintah Belanda tidak berniat untuk meluaskan sekolah ini. Pada tahun 1927 sekolah kelas dua menjadi pengganti sekolah *Vervolgschool* yang merupakan sekolah lanjutan pendidikan untuk lulusan sekolah desa dengan lama belajar 2 tahun. Biasanya lulusan Sekolah desa melanjutkan pendidikannya ke sekolah lanjutan (*Vervolgschool*). Sekolah lanjutan memiliki program pendidikan setara dengan sekolah kelas Dua. Sistem yang dinilai lebih hemat biaya dan membuka kesempatan untuk anak desa melanjutkan pelajarannya. Kemudian batas sekolah desa dan sekolah sambungan lambat laun lenyap. Antara kedua sekolah tersebut tidak ada hubungan yang terjalin lagi dan sekolah desa bebas dari isolasi.

Tabel Jumlah Murid Sekolah Kelas Dua tahun 1915, 1917, 1919

Tahun		1915	1917	1919
Jawa	Pria	108.893	132.194	140.037
	Wanita	7.306	10.221	12.249
Luar Jawa	Pria	57.163	61.067	65.725
	Wanita	12.968	11.808	14.302

Sumber: Nasution (1995).

Statuta 1983 menjelaskan program Sekolah Kelas Dua terdiri dari mata pelajaran berhitung, membaca, dan menulis dalam bahasa melayu. Pengajaran agama dilarang di pelajari. Kurikulum berjalan sederhana karena diperuntukkan untuk rakyat. Namun kemungkinan kurikulum dapat disesuaikan lagi sesuai keadaan sekolah, dengan tanda kutip persetujuan inspektur harus didapatkan dan pelajaran bahasa Belanda tidak di ajarkan. Perkembangan mata pelajaran lainnya menyamakan dengan Sekolah Kelas Satu. Kemudian tahun 1895 diterbitkan peraturan baru yang berisi, program sekolah Kelas Dua disamakan dengan program sekolah Kelas Satu antara kelas 1-3.

Pelajaran menggambar diajarkan tahun 1892. Di kelas 3 sekolah kelas dua ini pelajaran bernyanyi diajarkan namun dihapus tahun 1912 karena alasan fungsinya. Ilmu bumi diberikan di kelas 3 mulai dari lingkungan sekolah kemudian daerah geografis yang lebih luas tanpa melewati batas Indonesia. Mata pelajaran di perluas dengan pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yakni, pelajaran ilmu alam, tanaman, binatang, dan tubuh manusia yang dipelajari di kelas 4 dan 5. Kurikulum tahun 1892 dan kurikulum tahun 1918 tidak melibatkan mata pelajaran pendidikan jasmani dan ketrampilan/pekerjaan tangan. Tahun 1918 disediakan biaya sebanyak f 20.000,- untuk pendidikan jasmani di Kweekschool agar kemudian dilaksanakan di sekolah kelas Dua.

Sekolah kelas dua tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk murid-muridnya belajar. Biasanya sekolah ini menggunakan berbagai macam gedung yang dapat dimanfaatkan menjadi gedung sekolah. Komunitas gereja di Ambon dan Manado bersedia meminjamkan Gerejanya untuk dijadikan gedung sekolah kelas dua ini. Hall gereja dimanfaatkan menjadi ruangan kelas yang dapat memuat beberapa kelas sekaligus. Meskipun sekolah ini diserahkan seluruhnya kepada penduduk lokal sekolah, pendirian sekolah memerlukan dana. Kondisi perekonomian penduduk lokal tidak memadai sehingga mempengaruhi pendirian yang jauh dari kata layak (tidak memenuhi syarat). Keadaan tidak jauh beda di beberapa sekolah kelas dua di daerah lain. Karenanya untuk memudahkan kegiatan pembelajaran sekolah di gratiskan atau tidak di pungut biaya.

Jumlah anak putus sekolah melampaui jumlah anak yang menamatkan sekolah dengan mendapatkan ijazah. Hanya 8 sampai 10% dari anak perempuan dan sekitar 30% dari anak laki-laki yang berhasil menamatkan pelajarannya. Banyaknya angka putus sekolah dikalangan anak pribumi dikarenakan beberapa alasan seperti: berpindah tempat tinggal, pindah sekolah, sering tidak masuk sekolah, perilaku buruk, sakit, bekerja, melampaui batas umur pendidikan yakni 17 tahun, kematian, biaya sekolah dan alasan-alasan lain. *Drop out* yang tinggi juga disebabkan karena kurikulum sekolah yang tidak menarik perhatian siswa. Kondisi gedung sekolah yang mirip dengan gudang sangat disayangkan.

Kurikulum tidak memperhitungkan minat dan kebutuhan anak-anak pribumi. Guru-guru yang mengajar pun tidak dipersiapkan untuk memotivasi anak dan mengembangkan bakat mereka secara maksimal. Sekolah kelas dua tidak memberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan kecuali pekerjaan rendah. Bahkan untuk berpindah ke sekolah yang terdapat pelajaran bahasa Belanda dapat dikatakan tidak mungkin. Tapi banyak anak-anak yang awalnya memasuki sekolah desa 3 tahun kemudian meneruskan ke sekolah sambungan (*Vervolgschool*) 2 tahun sehingga sekolah kelas 2 akhirnya terpecah menjadi sekolah sambungan kelas 4 dan 5.

Hasil dari inspeksi di sekolah menduga banyaknya absensi dan putus sekolah diakibatkan oleh rendahnya uang sekolah bahkan sering dibebaskan biaya. Hal tersebut menyebabkan pandangan rendah terhadap pendidikan. Uang sekolah dikategori rendah adalah 10 sen untuk anak pertama dan 5 sen untuk anak selanjutnya.

Tabel Uang Sekolah di Sekolah Kelas Dua

Kategori	Anak Kesatu	Anak Kedua	Anak Ketiga
Kategori 1	f 0,50	f 0,25	f 0,10
Kategori 2	f 0,25	f 0,10	f 0,08
Kategori 3	f 0,10	f 0,05	f 0,05

Sumber: Nasution (1995).

Orang tua menyikapi secara berbeda-beda mengenai pendidikan. Di Sumatera tengah (1912) tidak semua anak dapat diterima di sekolah karena

jumlah sekolah tidak mencukupi. Sementara di Semarang dan pekalongan orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di madrasah. Terdapat 45% absensi karena Sekolah Kelas Dua kurang dihargai di masyarakat. Karenanya pegawai pemerintah menggunakan kewibawaan untuk menghimbau orang tua melalui raja-raja lokal agar menyekolahkan anaknya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat membendung presentasi absensi dan drop out yang tinggi (Nasution, 1995).

3. Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (*Volksschool*)

Sekolah desa atau sekolah rakyat didirikan pada tahun 1907. Pendirian sekolah ini atas usul dan perintah Gubernur jenderal Van Heutz. Sayangnya, sekolah ini tidak diselenggarakan oleh pemerintahan. Pemerintahan kolonial tidak menaungi sekolah ini melainkan diselenggarakan oleh desa. Sekolah desa didirikan dengan tiga syarat yakni: syarat pertama pembangunan sekolah desa dan pengganjian guru ditanggung oleh oleh masyarakat desa, namun pemerintah harus bersedia membantu jika terdapat keperluan terutama dalam bentuk sarana pembelajaran dan uang. Syarat kedua adalah pembangunannya harus melewati masa percobaan. Syarat ketiga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah desa tidak boleh dipaksa bersekolah, mereka harus memiliki kedarannya sendiri. Di tahun 1906 percobaan sekolah desa telah dimulai di 4 kabupaten yakni Kediri, Kedu, Cirebon dan Priangan. Maksud didirikannya sekolah desa untuk memberantas buta huruf khususnya untuk Bumiputera (Syaharuddin & Susanto, 2019).

Hakekatnya sekolah desa didirikan dengan tujuan mencetak petani dan buruh yang terpelajar. Akan tetapi dalam penerapan pendidikannya tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Sebagian besar orang desa berfikiran sekolah membuang-mbuang waktu. Persekolahan yang umumnya diadakan dipagi hari menyita waktu anak-anak membantu orang tua mereka bekerja di sawah atau membantu pekerjaan rumah. Pemikiran tersebut sangat mencerminkan kehidupan sosial ekonomi kalangan rendah. keberadaan sekolah desa juga tidak mudah disesuaikan oleh masyarakat desa karena tidak cocok dengan gaya hidupnya. Bahkan anak-anak desa yang bersekolah rela meliburkan diri tidak dan tidak pergi ke sekolah jika mereka diperlukan untuk membantu orang tua mereka memanen di sawah atau membantu keluarga mereka pada acara

seperti pesta perkawinan atau keagamaan di rumah. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan anak-anak desa banyak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya.

Permasalahan serupa otomatis telah menghambat manfaat adanya sekolah dasar bagi orang-orang bumiputera. Mungkin, orang-orang desa masih menganggap bahwa sekolah desa merupakan hal baru dan asing berbeda dengan pendidikan di pesantren yang telah dikenal di mana-mana. Sekolah desa dianggap tidak beruntung dan tidak dapat mewujudkan cita-citanya untuk mendidik warga desa. Tapi terdapat beberapa sekolah desa dengan guru berkualitas tinggi dan memberikan pengaruh baik meski hanya ditemukan sebagian kecil di Indonesia.

Laporan pendidikan tahun 1892 sampai 1893 jelaskan bahwa banyak jumlah penduduk pribumi buta huruf. Hanya 3.964 atau 8% dari 51.464 kepala desa di Jawa yang dapat membaca huruf tulisan lokal. Dari 26.708 juru tulis di Jawa hanya 6.560 atau 25% yang dapat menulis huruf latin. Kemampuan berhitung juga rendah terdapat 2% dari keseluruhan kepala desa di Pulau Jawa yang berhasil memecahkan soal berhitung dengan bilangan pecahan. Meskipun kurikulum sekolah desa sederhana namun sekolah ini memiliki solusi untuk kebutuhan rakyat desa. Guru-guru yang mengajar di sekolah desa bukan guru dari pemerintahan kolonial melainkan dari pegawai desa itu sendiri. Karena sekolah ini diserahkan kepada desa otomatis perkembangannya berjalan lambat. Penyebabnya adalah lebih banyak penduduk desa di Indonesia hidup dengan kemiskinan dan tidak berminat pada pendidikan. Di tahun 1920 pemerintah kolonial akhirnya memberikan bantuan kepada sekolah desa. Dengan bantuan tersebut situasi pendidikan di desa mulai membaik meski tidak berlangsung lama (Makmur, 1993).

Inspektur memiliki tanggung jawab kepada seluruh sekolah desa di Hindia Belanda berada naungan departemen dalam negeri. Namun dalam melaksanakan tugasnya inspektur dibantu 3 asisten ekspektur dan kepala sekolah dan penilik sekolah. Pengangkatan penilik sekolah berkebangsaan Indonesia ternyata sangat bijaksana. Tugas penilik bukan hanya menginfeksi pekerjaan guru tapi juga membimbing guru agar mengajar dengan lebih baik. Karena pendidikan desa

memiliki latar belakang pendidikan rendah maka tugas inspeksi harus memiliki aspek penilaian dan pendidikan. Para penilik di bawah pengawasan instansi yang lebih tinggi.

Peresmian sekolah desa, yang sebelumnya adalah sekolah percobaan. Mengalami peningkatan yang sangat pesat. Jarak tahun 1707 hingga 1910 menjadi 70.000. kemudian di tahun 1914 terdapat penambahan siswa yakni 300.000 dengan tambahan 40.000. Penambahan murid tidak besar jumlahnya diantara tahun 1914 dan 1920 hal tersebut terjadi karena perpindahan pengurus sekolah. Administrasi sekolah dari departemen dalam negeri yang dihormati rakyat diganti dan diberikan kepedpartemen pengajaran dan agama yang tak begitu besar pengaruhnya dalam pandangan masyarakat. Jumlah murid perempuan sangat rendah jumlahnya, hanya 6,3% di tahun 1914 dan 10,3% di tahun 1919. Angka putus sekolah sangat tinggi di sekolah desa khususnya di kelas rendah. Jumlah putus sekolah lebih dari 80% dari murid yang terdaftar di kelas 1 di kelas 2 memiliki murid kurang dari seperlima murid kelas 1 dan jumlah murid kelas 3 kurang dari 1/18 dari murid yang masuk kelas 1. Alasan putus sekolah diantaranya 50% muridnya sering bolos sekolah, 13% murid mengalami sakit atau meninggal, 16% lainnya berpindah tempat tinggal ke desa lain. Dan banyak orang tua yang memerlukan anaknya untuk membantu bekerja di rumah atau di sawah.

Fasilitas di sekolah desa sangat memprihatinkan. Berbeda jauh dengan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Gedung sekolah, rata-rata menggunakan gedung masyarakat yang dapat di manfaatkan menjadi ruang belajar. Sekolah desa tidak menyediakan fasilitas seperti meja dan kursi seperti sekolah barat lainnya. Anak-anak muridnya hanya duduk dilantai seperti halnya yang di lakukan di rumahnya (lesehan). Mejanya menggunakan kaleng kosong yang diperoleh dari warung Cina (Nasution, 1995).

4. Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*)

Sekolah lanjut merupakan *sekolah yang dibuka untuk sekolah lanjutan dari sekolah desa* (*Volksschool*). Lama belajar di sekolah ini adalah 3 tahun sekolah ini dikhususkan untuk murid-murid sekolah desa yang memiliki prestasi yang baik. Pendirian sekolah ini bersamaan tahunnya dengan pendirian his yakni tahun

1914 (Makmur, 1993). Di beberapa lokasi sekolah diperluas dan terdapat mata pelajaran tambahan yakni pelajaran pertanian (Syaharuddin & Susanto, 2019).

5. Sekolah Peralihan

Sekolah peralihan merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa (*Volksschool*) yang lama belajarnya 3 tahun dengan sekolah berbahasa pengantar bahasa daerah. Kemudian ke sekolah peralihan dengan berbahasa pengantar bahasa Belanda dengan nama belajar 5 tahun. Sekolah peralihan (*Schakelschool*) dapat menampung murid-murid tamatan sekolah lanjutan (*Vervolgschool*). Sekolah ini dikhususkan atau mereka yang dianggap pandai dapat memasuki sekolah ini (Makmur, 1993).

KESIMPULAN DAN SARAN

Awalnya pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda bertujuan untuk melanjutkan pelajaran anak-anak Belanda yang ikut orang tua mereka ke Indonesia karena tuntutan pekerjaan. Lamanya orang-orang belanda menetap di Indonesia mengakibatkan banyaknya pernikahan campuran. Pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk mencerdaskan rasnya kemudian mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak pegawai Belanda yang dapat dimasuki anak-anak campuran. Sekolah tersebut diharapkan dapat mencerdaskan dan menanamkan sifat nasionalisme Belanda kepada anak-anak turunan campuran Indo-Belanda yang tinggal di Indonesia.

Suksesnya industri yang dijalankan pemerintahan kolonial Belanda dalam memperkaya diri, membutuhkan banyak pegawai yang dapat dipekerjakan di perusahaan Belanda dengan gaji murah. Sekolah yang didirikan hanya memuat pembelajaran sederhana yang dapat dimanfaatkan menjadi juru tulis/pegawai rendahan di perkebunan saja. Eksploitasi yang terus menerus mengakibatkan merosotnya kondisi tanah Jawa otomatis menurunkan kesejahteraan masyarakat jawa. Keadaan yang sangat merosot ini telah menarik perhatian oleh kelompok sosialis yang kemudian melahirkan Politik Etis. Politik etis berjalan dengan usaha menyejahterahkan masyarakat pribumi dengan mengembangkan, irigas, emigras, dan edukasi.

Edukasi sebagai aspek yang sangat penting dan menjadi bahasan pokok dalam penulisan ini. Nyatanya pendidikan dasar yang dijalankan masih dibedakan. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh tujuan pemerintah kolonial Belanda yang tidak menginginkan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi anak-anak pribumi. Pemerintah kolonial khawatir, hal tersebut akan menjadi bomerang dan menyerang mereka kembali. Kemudian pendidikan dijalankan dengan prinsip politik Belanda yakni: gradualisme, dualisme, kontrol sentral, keterbatasan tujuan, prinsip konkordansi, tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Pendidikan dasar masa kolonial Belanda dibagi menjadi 2 berdasarkan bahasa pengantarnya yakni: pendidikan dasar pribumi yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah dan pendidikan dasar non-pribumi (Barat) menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda.

Perbedaan kedua jenis pendidikan dasar ini juga sangat signifikan, seperti sekolah pribumi dibiayai sendiri oleh masyarakat desa, gedung sekolah berupa balai desa, pelajaran yang diajarkan hanya pelajaran sederhana, guru yang mengajar hanya tamatan sekolah dasar bahkan juru tulis pun dapat menjadi guru, guru belanda tidak mau mengajar karena takut kualitasnya menurun, minat belajar anak-anak pribumi juga buruk sehingga tingkat putus sekolah tinggi. Sementara untuk anak-anak belanda, mendapatkan gedung sekolah sendiri, pelajaran mencakup berbagai hal, dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, terdapat perpustakaan dengan banyak buku bacaan, pendidikan di tanggung pemerintah kolonial, bahkan bebas biaya untuk anak belanda miskin. Sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan jabatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Sumardi, M.Hum dan ibu Dr. Nurul Umamah, M.Pd yang telah membimbing penulis dalam melaksanakan penulisan penelitian dengan saran-saran membangun yang telah diberikan. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Alpian, Y., S. W. Anggraeni., U. Wiharti., & N. M. Soleha. (2019). Pentingnya Pendidikan bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*. 1(1). 66-72.
- Daliman, A. (2017). *Sejaraah Indoensia abad XIX-Awal abad XX: Sistem Politik Kolonail dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Edisi Baru. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Makmur, D., P. S. Haryono., S. Musa., & H. S. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Edisi 1993. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.
- Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifa'i, M. (2017). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Cetakan II. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Stroomberg, J. (1924). *1930 Handbook of The Netherlands East-Indies*. Java: Division of Commerce of the Departement of Agriculture, Industry and Commerce Buitenzorg. Terjemahan oleh Apriyono, H. 2018. *HINDIA BELANDA 1930 (Edisi Translate)*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Syahrudin & H. Susanto, B. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Revormasi)*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.
- Wiessing, M. J. (1901). *Het Ondewijs in Nedherlandsch (Verspreide Stukken)*. Batavia: Typ Lit F. R. smiths.